

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I

Untuk Periode Yang Berakhir Tanggal
30 JUNI 2025

Jl. Sisingamangaraja No. 477 Sibolga
Telp/Fax: 0631-22929, 0631-21714 E-mail:
imigrasi_sibolga@yahoo.co.id
Sumatera Utara

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sibolga, Juli 2025

Kepala,



Akbar Drajat Bogitara

NIP. 19860514 200604 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	x
Daftar Isi	x
Pernyataan Tanggung Jawab	x
Ringkasan	x
I. Laporan Realisasi Anggaran	x
II. Neraca	x
III. Laporan Operasional	x
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	x
V. Catatan atas Laporan Keuangan	x
A. Penjelasan Umum	x
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	x
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	x
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	x
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	x
F. Pengungkapan Penting Lainnya	x
VI. Lampiran dan Daftar	x

KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA
JL. Sisingamangaraja No. 477 Sibolga
TELEPON 0631 22929, FAXIMILE 0631 21714

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Sibolga, Juli 2025

Kepala,

Akbar Drajat Bogitara

NIP. 19860514 200604 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I Tahun Anggaran 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 5.347.314.749,- atau mencapai 98 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 5.454.756,-. Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp 2.426.927.185,- atau mencapai 36,75 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 6.604.601.000,-.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2025. Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 118.901.199,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 118.901.199,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 297.176.189 dan Rp 19.713.069.553.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 5.597.655.398,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 2.528.555.570,- sehingga terdapat Defisit/Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp 3.069.099.828,- Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp0.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 3.069.099.828,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp0 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp (3.170.087.564,) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp (100.987.736)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar

Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2025		% thd Angg	THN 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	5.454.756.000	5.347.314.749		0
JUMLAH PENDAPATAN		5.454.756.000	5.347.314.749		0
BELANJA					
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2	2.222.986.000	1.424.068.007	64	0
Belanja Barang	B.3	4.332.795.000	1.002.859.178	23	0
Belanja Modal	B.4	48.820.000	0	0	0
Jumlah Belanja Operasi		6.604.601.000	2.426.927.185	37	0
Belanja Modal	B.5				
Jumlah Belanja Operasi					
JUMLAH BELANJA		6.604.601.000	2.426.927.185	37	0

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA**KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA
NERACA
PER 30 JUNI 2025 DAN 2024***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2025	2024
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran		30.000.000	0
Piutang Bukan Pajak		640.649	0
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		640.649	0
Persediaan		88.260.550	0
JUMLAH ASET LANCAR		118.901.199	0
JUMLAH ASET		118.901.199	0
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Kepada Pihak Ketiga		188.988.935	0
Utang Yang Belum Ditagihkan		900.000	0
Utang Muka dari KPPN		30.000.000	0
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		219.888.935	0
JUMLAH KEWAJIBAN		219.888.935	0
EKUITAS			
Ekuitas		(100.987.736)	0
JUMLAH EKUITAS		(100.987.736)	0
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		118.901.199	0

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-06-2025	THN 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	5.597.655.398	-
JUMLAH PENDAPATAN		5.597.655.398	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	1.582.256.942	0
Beban Persediaan	D.3	0	0
Beban Jasa	D.4	607.331.073	0
Beban Pemeliharaan	D.5	41.702.516	0
Beban Perjalanan Dinas	D.6	297.256.039	0
Beban Barang untuk Diserahkan	D.7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak	D.10	0	0
Beban Lain-lain	D.11	0	0
JUMLAH BEBAN		2.528.555.570	0
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		3.069.099.828	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		0	0
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
NON OPERASIONAL		0	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		3.069.099.828	0
POS LUAR BIASA	D.13		
Pos Luar Biasa		0	0
Beban Luar Biasa		0	0
POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		3.069.099.828	0

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2025	2024
SURPLUS/DEFISIT – LO	D.1	3.069.099.828	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	D.2	(3.170.087.564)	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	D.3	(100.987.736)	0
EKUITAS AKHIR	D.4	(100.987.736)	0

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor 2005/BALAP.007/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Entitas berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No 477 Sibolga.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Imigrasi Kelas II Sibolga berkomitmen dengan misi **"mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan. Melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang berkualitas."** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
2. Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan,
3. Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya,
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis Akuntansi

A.3 Basis Akuntansi

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga. Di samping itu, dalam penyusunannya

telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja

(3) Belanja

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN),

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa,

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca,
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tatel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil,

sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas
Pos Laporan
Realisasi
Anggaran

Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga memperoleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 6.604.601.000 Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Rincian Perubahan DIPA
Tahun Anggaran 2025
(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNPB	5.454.756.000	5.347.314.749
Jumlah Pendapatan	5.454.756.000	5.347.314.749
Belanja		
Belanja Pegawai	2.222.986.000	1.424.068.007
Belanja Barang	4.332.795.000	1.002.859.178
Belanja Modal	48.820.000	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	6.604.601.000	2.426.927.185

B.1 Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp 5.347.314.749

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 5.347.314.749 atau mencapai 98 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 5.454.756.000. Pendapatan Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga terdiri dari Pendapatan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan (dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak	5.454.756.000	5.347.314.749	98
Jumlah	5.454.756.000	5.347.314.749	98

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 202 mengalami kenaikan 98 persen dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh mulai meningkatnya aktivitas

Perjalanan Keluar Negeri dan Pengurusan Ijin Tinggal Terbatas ataupun Ijin Tinggal Kunjungan yang dilakukan oleh para Warga Negara Asing.
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024
(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak	5.347.314.749	0	98
Jumlah	5.347.314.749	0	98

*Realisasi Belanja
Rp 2.426.927.185*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga pada TA 2025 adalah sebesar Rp 2.426.927.185 atau 37 Persen dari anggaran belanja sebesar Rp 6.604.601.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.222.986.000	1.424.068.007	64
Belanja Barang	4.332.795.000	1.002.859.178	23
Belanja Modal	48.820.000	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Total Belanja Kotor	6.604.601.000	2.426.927.185	37
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0
Jumlah	6.604.601.000	2.426.927.185	37

*Belanja Pegawai
Rp1.424.068.007*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1.424.068.007 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja Barang
Rp 1.002.859.178

B.4 Belanja Barang
Realisasi Belanja Barang yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1.002.859.178 dan Rp0.

Belanja Modal
Rp0

B.5 Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja Modal Tanah
Rp 0

B.5.1 Belanja Modal Tanah
Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Rp0

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 adalah sebesar Rp0. Hal ini disebabkan oleh pengadaan peralatan dan mesin sebagai fasilitas pendukung untuk kegiatan kantor.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Rp 0

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp 0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Belanja Bantuan Sosial
Rp 0

B.6 Belanja Bantuan Sosial
Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar Rp
118.901.199

Jumlah Aset Lancar Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 118.901.199 dan Rp0.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp 30.000.000

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 30.000.000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Kas di Bendahara Pengeluaran

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)*

Keterangan	Tahun 2025	Tahun 2024
Uang Tunai	30.000.000	0
Bank	0	0
Jumlah	30.000.000	0

Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp 0

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0. dan Rp 0.

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp 0

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Piutang Bukan Pajak
Rp 640.694

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 640.649 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel Piutang Bukan Pajak
Rincian Piutang Bukan Pajak TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)*

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Piutang PNB	0	0
Piutang Lainnya	640.694	640.649
Jumlah	640.649	640.649

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal Neraca.

*Bagian Lancar Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp 0*

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

*Bagian Lancar Tagihan
Penjualan Angsuran
Rp 0*

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jk. Pendek Rp
0*

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0, yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-masing debitur.

*Beban Dibayar di Muka
Rp 0*

C.1.8. Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari

barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp 0

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Persediaan
Rp 88.260.550

C.1.10. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 88.260.550 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Persediaan
Rincian Persediaan TA 2025 dan 2024
(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2025	Tahun 2024
Barang Konsumsi	88.020.550	0
Amunisi	0	0
Bahan untuk Pemeliharaan	240.000	0
Persediaan Lainnya	0	0
Jumlah	88.260.550	0

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap
Rp 0

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah Rp0	C.2.1. Tanah Tanah yang dimiliki oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
Peralatan dan Mesin Rp0	C.2.2. Peralatan dan Mesin Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
Gedung dan Bangunan Rp0	C.2.3. Gedung dan Bangunan Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.
Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 0	C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0 .
Aset Tetap Lainnya Rp 0	C.2.5. Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0
Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 0	C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp0	C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
Piutang Jangka Panjang Rp 0	C.3. Piutang Jangka Panjang Piutang Jangka Panjang Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang TPA.

*Piutang Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
Rp 0*

C.3.1. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Imigrasi Kelas II TPI Sibolga per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan Penjualan
Angsuran Rp 0*

C.3.2. Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp 0*

C.3.3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Aset Lainnya
Rp 0*

C.4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

*Aset Tak Berwujud
Rp0*

C.4.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor

Imigrasi Kelas II TPI Sibolga berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Aset Lain-Lain
Rp0

C.4.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga.

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya Rp0

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

*Tabel Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset
Lainnya TA 2025*

(dalam rupiah)

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1.	<i>Software</i>	0	0	0
	Jumlah	0	0	0
B.	Aset Lain-lain			
	Jumlah	0	0	0
	Total	0	0	0

Kewajiban Jangka
Pendek Rp 291.888.935

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 219.888.935 dan Rp0.

Uang Muka dari KPPN
Rp30.000.000

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 30.000.000 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada Pihak
Ketiga Rp189.988.935*

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 189.988.935 dan Rp 0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

*Pendapatan Diterima di
Muka Rp0*

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK.

*Beban Utang Jangka
Pendek Lainnya Rp
900.000*

C.5.4. Beban Utang Jangka Pendek lainnya

Beban Utang jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 900.000 dan Rp0

*Beban Hibah Yang
Belum Disahkan Rp 0*

C.5.5 Beban Hibah yang Belum Disahkan

Beban Yang Belum Disahkan per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah Sebesar Rp0 dan Rp0.

*Ekuitas
Rp(100.987.736)*

C.6 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan
PNBP Rp
5.597.655.398

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp5.597.655.398 dan Rp 0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak	5.597.655.398	0	100
Jumlah	5.597.655.398	0	100

Beban
Pegawai Rp
1.582.256.942

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 1.582.256.942 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai

TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Gaji	1.144.521.582	0	100
Beban Tunjangan-tunjangan	409.151.360	0	100
Beban Honorarium dan Vakasi	0	0	100
Beban Lembur	28.584.000	0	100
Jumlah Beban	1.582.256.942	0	100

Beban Pegawai
Rp 0

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-

barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Barang
dan Jasa Rp
607.331.073

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 607.331.073 dan Rp0. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Penurunan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya penghematan atas beban-beban operasional perkantoran, penurunan pengiriman surat karena sudah disampaikan secara *online*, penurunan beban sewa yang disebabkan adanya pembelian aset sehingga tidak dilakukan penyewaan. Walaupun sebagian besar beban barang dan jasa mengalami penurunan.

Rincian Beban Barang dan Jasa
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	307.303.200	0	100
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos	153.500	0	100
Beban Honor Operasional Satker	30.300.000	0	100
Beban Barang Operasional Lainnya	1.642.120	0	100
Belanja Bahan	76.438.050	0	100
Beban Honor Output Kegiatan	8.200.000	0	100
Beban Barang Non Operasional Lainnya	86.998.500	0	100
Beban Langganan Listrik	76.181.141	0	100
Beban Langganan Telepon	521.244	0	100
Beban Langganan Air	1.043.318	0	100
Beban sewa	17.950.000	0	100
Beban Jasa lainnya	600.000	0	100
Jumlah Beban	607.331.073	0	100

Beban
Pemeliharaan
Rp41.702.516

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 41.702.516 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya pengeluaran untuk mempertahankan performa dan kapasitas atas aset-aset lama serta pengeluaran untuk asuransi atas gedung dan bangunan. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41.702.516	0	100
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	0
Jumlah Beban	41.702.516	0	100

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp297.265.039

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 297.265.039 dan Rp0. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat dan adanya pelatihan Kantor Pusat yang perjalanan dinasnya ditanggung sendiri. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	2025	2024	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	290.815.039	0	100
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.800.000	0	100
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.650.000	0	100
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0	0

Jumlah Beban	297.265.039	0	100
---------------------	--------------------	----------	------------

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
Kepada
Masyarakat Rp0*

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Beban Bantuan
Sosial Rp 0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp 0*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Beban
Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih Rp 0*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

*Kegiatan Non
Operasional
Rp0*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

*Pos Luar Biasa
Nihil*

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahun 2025 dan 2024.

	E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS E.1. Ekuitas Awal Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp0.
Ekuitas Awal Rp 0	
Defisit LO Rp3.069.099.828	E.2. Surplus/Defisit-LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah defisit sebesar Rp 3.069.099.828 dan Rp0. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Rp0	E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0.
Penyesuaian Nilai Aset Rp0	E.4.1. Penyesuaian Nilai Aset Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.
Koreksi Nilai Persediaan Rp0	E.4.2. Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0.
Selisih Revaluasi Aset Rp0	E.4.3. Selisih Revaluasi Aset Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Rp0	E.4.4. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-lain
Rp0*

E.4.5. Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang.

*Transaksi Antar
Entitas Rp
(3.170.087.564)*

E.5. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp (3.170.087.564) dan Rp 0.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN.

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).

Pada periode hingga 30 Juni 2025 DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp0.

E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp0. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp0.

E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 adalah Rp0.

*Ekuitas Akhir
Rp(100.987.736)*

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp (100.987.736) dan Rp0.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

--

F.1 Pengungkapan Lain-lain

Terdapat Transfer Masuk Pendapatan bukan pajak lainnya diterima dimuka pada Kode Satker Lama 408981 berupa pendapatan paspor sebesar Rp 249.700.000,- .

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN 137
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI 03
SATUAN KERJA : KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA 692897

Tgl Data : 25/07/25 1:04 AM
Tgl Cetak : 25/07/25 8:14 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	5,454,756,000	5,347,314,749	(107,441,251)	98.03	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	5,454,756,000	5,347,314,749	(107,441,251)	98.03	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	5,454,756,000	5,347,314,749	(107,441,251)	98.03	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	6,604,601,000	2,426,927,185	(4,177,673,815)	36.75	0	0	0	0
1. Belanja Pegawai	2,222,986,000	1,424,068,007	(798,917,993)	64.06	0	0	0	0
2. Belanja Barang	4,332,795,000	1,002,859,178	(3,329,935,822)	23.15	0	0	0	0
3. Belanja Modal	48,820,000	0	(48,820,000)	0.00	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN 137
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI 03
SATUAN KERJA : KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA 692897

Tgl Data : 25/07/25 1:04 AM
Tgl Cetak : 25/07/25 8:14 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	6,604,601,000	2,426,927,185	(4,177,673,815)	36.75	0	0	0	0
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Sibolga, 25 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

AKBAR DRAJAT BOGITARA
198605142006041001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2025
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
ESELON I : (03) DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (692897) KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA

Tgl Data : 25/07/25 1:04 AM
 Tgl Cetak : 25/07/25 8:14 AM
 Halaman : 1
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	5,597,655,398	0	5,597,655,398	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	5,597,655,398	0	5,597,655,398	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	5,597,655,398	0	5,597,655,398	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	1,582,256,942	0	1,582,256,942	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	607,331,073	0	607,331,073	
Beban Pemeliharaan	41,702,516	0	41,702,516	
Beban Perjalanan Dinas	297,265,039	0	297,265,039	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
ESELON I : (03) DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (692897) KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA

Tgl Data : 25/07/25 1:04 AM

Tgl Cetak : 25/07/25 8:14 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,528,555,570	0	2,528,555,570	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	3,069,099,828	0	3,069,099,828	
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	3,069,099,828	0	3,069,099,828	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	3,069,099,828	0	3,069,099,828	

Keterangan :
FINAL

Sibolga, 25 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



AKBAR DRAJAT BOGITARA
198605142006041001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (692897) KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA

Tgl Data : 25/07/25 6:27 AM

Tgl Cetak : 25/07/25 8:14 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SURPLUS/DEFISIT-LO	3,069,099,828	0	3,069,099,828	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(3,170,087,564)	0	(3,170,087,564)	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(100,987,736)	0	(100,987,736)	0
EKUITAS AKHIR	(100,987,736)	0	(100,987,736)	0

Keterangan :

FINAL

Sibolga, 25 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



AKBAR DRAJAT BOGITARA

198605142006041001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (692897) KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA

Tgl Data : 25/07/25 1:04 AM

Tgl Cetak : 25/07/25 8:14 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	30,000,000	0	30,000,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	640,649	0	640,649	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	640,649	0	640,649	0.00
Persediaan	88,260,550	0	88,260,550	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	118,901,199	0	118,901,199	
JUMLAH ASET	118,901,199	0	118,901,199	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	188,988,935	0	188,988,935	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	900,000	0	900,000	0.00
Uang Muka dari KPPN	30,000,000	0	30,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	219,888,935	0	219,888,935	
JUMLAH KEWAJIBAN	219,888,935	0	219,888,935	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	(100,987,736)	0	(100,987,736)	0.00
JUMLAH EKUITAS	(100,987,736)	0	(100,987,736)	()
JUMLAH EKUITAS	(100,987,736)	0	(100,987,736)	()
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	118,901,199	0	118,901,199	

Keterangan :

FINAL

Sibolga, 25 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



AKBAR DRAJAT BOGITARA

198605142006041001 198605142006041001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (692897) KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA

Tgl Data : 25/07/25 1:04 AM

Tgl Cetak : 25/07/25 8:15 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	30,000,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	640,649	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	88,020,550	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	240,000	0
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	158,188,935
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	30,800,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	900,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	30,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,426,927,185
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	5,347,314,749	0
0.0	313221	Transfer Masuk	249,700,000	0
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	4,005,398
3.0	425211	Pendapatan Paspor	0	3,396,550,000
3.0	425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	1,739,100,000
3.0	425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	458,000,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,144,504,040	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	17,542	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	68,472,000	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	22,043,454	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	53,460,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	55,620,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	7,444,566	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	63,512,340	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	115,519,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	23,080,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	28,584,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	307,303,200	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	153,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	30,300,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,642,120	0
3.0	521211	Beban Bahan	76,438,050	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	8,200,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	86,998,500	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	76,181,141	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	521,244	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,043,318	0
3.0	522141	Beban Sewa	17,950,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	600,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (692897) KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA

Tgl Data : 25/07/25 1:04 AM

Tgl Cetak : 25/07/25 8:15 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41,702,516	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	290,815,039	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,800,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,650,000	0
JUMLAH			8,244,471,518	8,244,471,518

Keterangan :

FINAL

Sibolga, 25 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



AKBAR DRAJAT BOGITARA

198605142006041001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (692897) KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA

Tgl Data : 25/07/25 6:27 AM

Tgl Cetak : 25/07/25 8:15 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	2,426,927,185
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	5,347,314,749	0
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	3,364,749
3.0	425211	Pendapatan Paspor	0	3,146,850,000
3.0	425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	1,739,100,000
3.0	425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	458,000,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,018,721,560	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15,999	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	60,716,750	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	19,305,732	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	47,640,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	49,500,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	7,444,566	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	56,125,500	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	115,519,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	20,495,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	28,584,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	276,503,200	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	153,500	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	30,300,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,642,120	0
3.0	521211	Belanja Bahan	76,438,050	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	8,200,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	86,398,500	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	83,270,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	76,181,141	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	521,244	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	1,043,318	0
3.0	522141	Belanja Sewa	17,950,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	600,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41,702,516	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4,990,550	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	290,815,039	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,500,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,650,000	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	100
JUMLAH			7,774,242,034	7,774,242,034

Keterangan :
FINAL

Sibolga, 25 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



AKBAR DRAJAT BOGITARA
198605142006041001